

BAB I

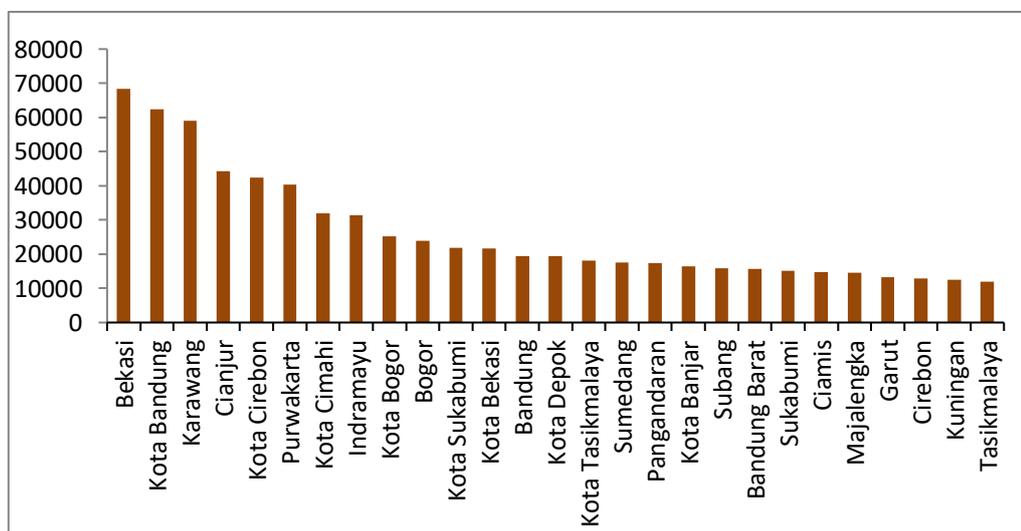
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator ekonomi makro digunakan juga di tingkat daerah guna menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu yang ditunjukkan oleh produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut Robert Solow (1970) pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang salah satunya bersumber dari hasil/output. *Output* yang dimaksud oleh Robert Solow adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto menurut badan pusat statistik yaitu sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah (Wulantari, 2021).

Secara makro, pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi, yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa lainnya. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sektor perekonomian terhadap PDRB suatu daerah maka akan dapat terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Fatmasari, 2022).

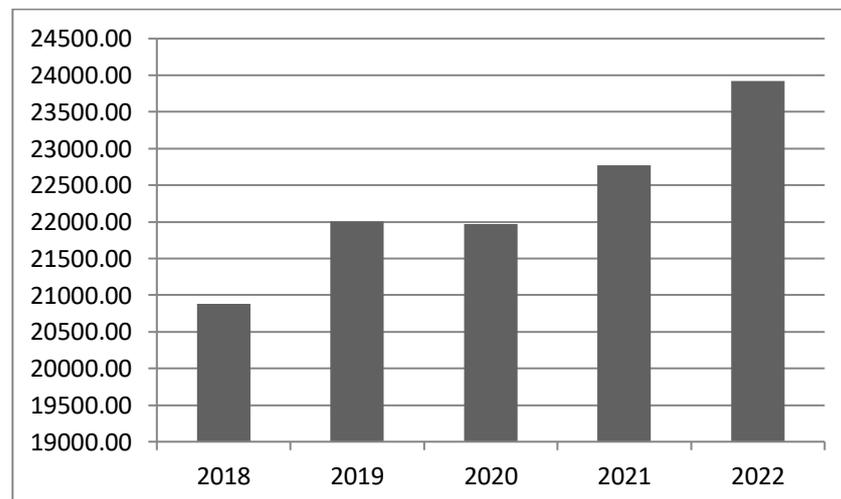
Menurut Rayhana (2021), PDRB dapat berupa PDRB atas harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, kemudian PDRB atas harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun. Dilihat berdasarkan data, rata-rata nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Ciamis dalam 10 tahun terakhir relatif masih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Kabupaten Ciamis terhadap PDRB Jawa Barat cukup rendah.



**Gambar 1.1 Rata-Rata PDRB ADHK Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat (dalam triliun rupiah)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Ciamis termasuk pada 10 besar kabupaten/kota dengan Nilai PDRB terendah di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Ciamis ini menempati urutan ke 6 terendah dari 27 kabupaten/kota se-provinsi Jawa Barat. Nilai PDRB suatu daerah yang rendah dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang melambat atau tidak mencapai target yang diharapkan. Sementara pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat.



Gambar 1.2 PDRB ADHK di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2022
(dalam triliun rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Gambar 1.2 menunjukkan nilai PDRB Kabupaten Ciamis dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan walaupun rata-rata PDRB Kabupaten Ciamis lebih rendah dari rata-rata PDRB Provinsi Jawa Barat, namun dilihat dari perkembangannya PDRB Kabupaten Ciamis cenderung mengalami tren kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai

dengan tahun 2022. Hanya saja pada tahun 2020, Nilai PDRB Kabupaten Ciamis mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2019 PDRB Kabupaten Ciamis sebesar 22001,24 triliun rupiah menjadi 21970,41 triliun rupiah pada tahun 2020. Kondisi ini diakibatkan karena adanya pandemi covid-19. Namun kemudian pada tahun 2021 PDRB mulai mengalami peningkatan kembali sebesar 22774,93 triliun rupiah yang mana PDRB pada tahun 2021 telah melewati PDRB pada tahun sebelumnya dikarenakan pemerintah gencar melakukan pemulihan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Tujuan dari sistem otonomi daerah ialah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menambah kekuatan fiskal daerah melalui program andalan daerah sehingga mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Salah satu upaya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melakukan strategi penataan pada keuangan daerah dan anggaran daerah. Maka dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis membutuhkan adanya peran aktif pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengelola keuangan daerah dan pendapatan asli daerahnya.

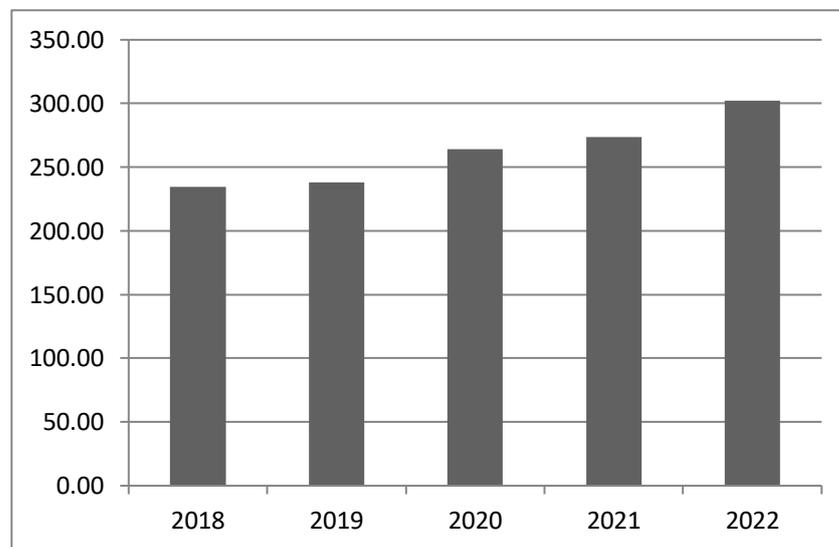
Darmawan (2014) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber

keuangan sendiri, sehingga daerah memiliki kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Desentralisasi fiskal ini diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keputusan pelaksanaan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “*money follows functions*”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu perwujudan dari asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah pun akan meningkat, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tambunan (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan PDRB. Maka dikatakan bahwa pendapatan asli daerah seharusnya dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang cukup baik. Berdasarkan beberapa sumber data yang diperoleh,

secara umum menyebutkan bahwa potensi daerah Kabupaten Ciamis dalam sektor pertanian, maka pengembangan potensi daerah Kabupaten Ciamis diarahkan dan difokuskan pada pengembangan agribisnis khususnya budidaya padi karena ketersediaan air di Ciamis mengakibatkan banyaknya sawah subur. Adapun data yang menunjukkan PAD Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

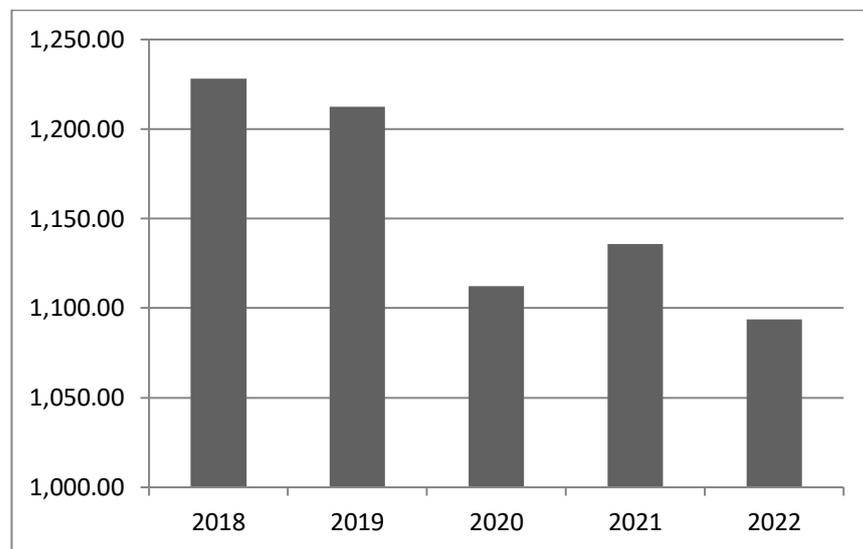
Gambar 1.3 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Ciamis mengalami tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2018 sebesar 234,61 miliar rupiah sampai dengan tahun 2022 sebesar 302,21 miliar rupiah. Penurunan terjadi pada tahun 2020 menjadi sebesar 264,28 miliar rupiah. Penurunan yang terjadi dikarenakan Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi

lokal serta adanya pembatasan sosial dan penutupan bisnis berdampak langsung pada pendapatan atau penerimaan pajak daerah.

Pada era desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan pelayanan terutama pada sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu dapat terwujud apabila terdapat upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya pemerintah perlu memberikan alokasi dana yang lebih besar untuk mencapai tujuan ini, salah satunya dengan dana alokasi umum. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Mulyani (2006) menyatakan bahwa DAU merupakan instrumen transfer ke daerah yang berperang untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah sekaligus pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hasdi (2015) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana alokasi umum digunakan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di Kabupaten Ciamis untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, salah satunya mendukung pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan bangunan umum serta untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan guna peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Dana alokasi umum sebagai salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten

Ciamis cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun data dana alokasi umum Kabupaten Ciamis dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.4 Dana Alokasi Umum Kabupaten Ciamis
Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)**

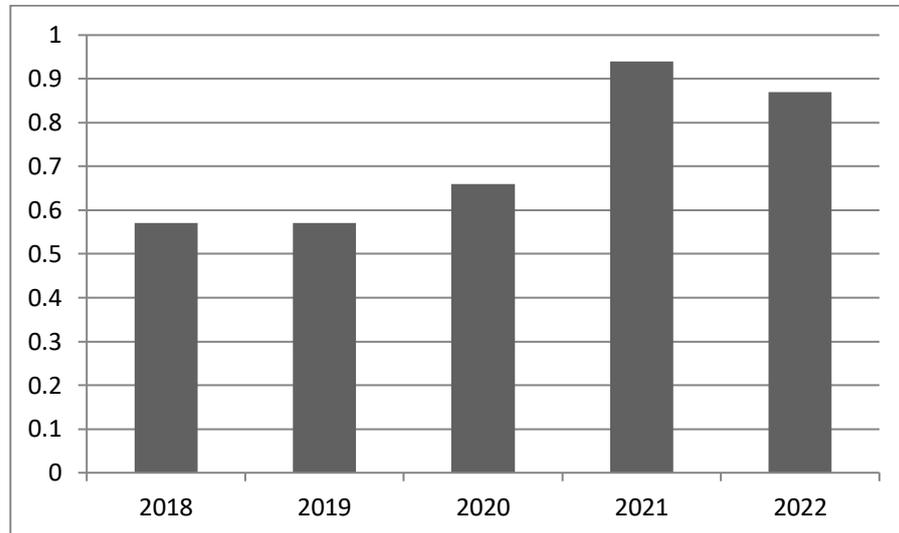
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa dana alokasi umum pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi dan mengalami tren penurunan pada tahun 2020 hingga sebesar 1112,34 miliar rupiah kemudian sedikit meningkat pada tahun 2021 namun menurun kembali pada tahun 2022. Penurunan anggaran DAU ini disebabkan karena prioritas pengeluaran pemerintah daerah yang bergeser untuk fokus pada penanganan krisis kesehatan dan dampak ekonomi pandemi Covid-19. Bahkan pada saat Covid-19, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengalokasikan minimal 8% dari DAU untuk vaksinasi dan insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan daerah.

Selain desentralisasi fiskal, Wongboonsin dan Phiromswad (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pun dapat dipengaruhi oleh faktor demografi. Faktor demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Todaro dan Smith (2006) berasumsi bahwa besar kecilnya laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Populasi yang besar dapat menciptakan pasar barang dan jasa yang besar, namun juga dapat membebani sumber daya dan infrastruktur. Kemudian pertumbuhan penduduk pun dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja, yang dapat menyebabkan peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk selain dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Menurut Julian L. Simon (1977) tentang pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perekonomian, bahwa pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu singkat memiliki pengaruh negatif, namun dalam jangka waktu yang lama justru pertumbuhan penduduk dapat berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Ciamis tercatat memiliki manajemen kependudukan dan keluarga berencana terbaik di Jawa Barat sehingga mendapat prestasi meneken angka LPP yang tercermin saat Kabupaten Ciamis mendapat juara "*Population Award 2009*". Berdasarkan data, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ciamis pada 5 tahun terakhir

cenderung stabil. Berikut merupakan data yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2018-2022.



**Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ciamis
Tahun 2018-2022 (dalam persen)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

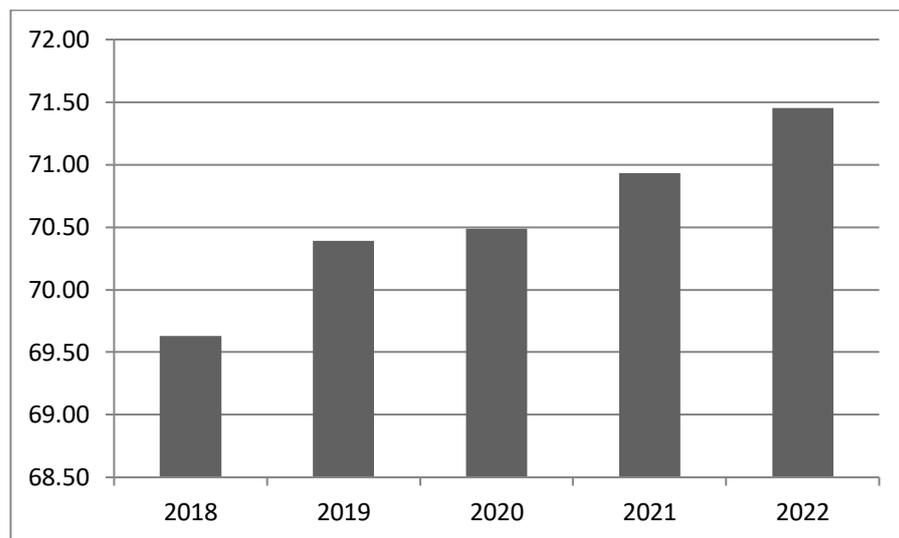
Gambar 1.5 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yakni sebesar 0,57%. Kemudian pada tahun 2020 meningkat hingga tahun 2021 dan menurun kembali pada tahun 2022 mencapai 0,87%. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni migrasi, angka kelahiran, serta peningkatan jumlah perempuan usia subur yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah kelahiran dan pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan penduduk (Deden Wahidin, 2020).

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Adam Smith (1776) mengatakan bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan

kemakmuran bangsa, sebab alam tidak ada artinya apabila tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Utami (2020), tingkat indeks pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kemampuan masyarakat untuk dapat berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan produktivitas dan kreatifitas mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzah (2015) yang menjelaskan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Andini (2016) dan Andre (2020) menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

Deden Wahidin (2020) menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ciamis dikatakan cukup berhasil. Pembangunan infrastruktur diarahkan kepada perbaikan dan peningkatan akses terhadap sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi sumber pendapatan masyarakat agar dapat mencapai sasaran pembangunan. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengupayakan agar tidak ada penduduk usia sekolah yang tidak/putus sekolah, menjaga kesehatan masyarakat maupun lingkungan supaya keberlangsungan hidup ibu hamil dan balita terjamin, serta meningkatkan

pendapatan masyarakat dan mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap tinggi. Adapun data indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ciamis dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis
Tahun 2018-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa IPM di Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Ciamis tercatat sebesar 69,63% dan terus meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai 71,45%. Capaian IPM yang terus meningkat menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Ciamis cukup berhasil. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Ciamis masih perlu meningkatkan intensitas pembangunan supaya peningkatan capaian IPMnya semakin tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, kemudian belum adanya penelitian terdahulu mengenai topik tersebut di Kabupaten Ciamis,

maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan nilai produk domestik regional bruto Kabupaten Ciamis serta memilih judul “**Analisis Determinan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Ciamis periode 2000-2022**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan penduduk, serta indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Ciamis tahun 2000-2022?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan penduduk, serta indeks pembangunan manusia secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Ciamis tahun 2000-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan penduduk, serta indeks pembangunan manusia

secara parsial terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Ciamis tahun 2000-2022.

2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan penduduk, serta indeks pembangunan manusia secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Ciamis tahun 2000-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan ilmiah

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Bagi penulis, sebagai latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang penulis dapatkan di perkuliahan. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

